



## WALIKOTA PAREPARE

### PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENGARUSUTAMAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
  - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kota Parepare;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Kluster.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konveksi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 68.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAREPARE**

**Dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER /Menetapkan .....

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Analisa Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9. Pembangunan Responsif Gender adalah terselen program pembangunan sesuai dengan bidang tugas, fungsi masing-masing.
10. Anggaran Responsif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

## **BABA II RUNG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB III .....

## **BAB III TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG Bagian Kesatu**

### **Tugas**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- (2) Dalam rangka merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan PUG, maka setiap SKPD wajib memiliki data terpilah sesuai bidang tugas masing-masing.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pendidikan /pelatihan PUG di Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Wewenang**

#### **Pasal 5**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan,PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala;
- e. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG;
- f. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- g. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- h. Membentuk focal point PUG.

## **BAB IV FOCAL POINT PUG**

### **Pasal 6**

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;

c.melaksanakan .....

- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masyarakat;
  - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan SKPD.

## BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

##### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

##### Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian .....

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 10

Walikota bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

### Pasal 11

Walikota menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai coordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

### Pasal 12

- (1) Dalam Upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan Keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 13

Tugas Pokja PUG meliputi :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun
- d. Mendorong terwujudnya perencanaan penganggaran yang responsive gender;
- e. Menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun
- f. Bertanggungjawab kepada Walikota melalui Wkail Walikota;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penempatan Focal Point di masing-masing SKPD; dan
- m. Melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan setiap 6 Bulan kepada Walikota melalui Wakil Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang telah mengikuti pelatihan/pendidikan perencanaan penganggaran responsive Gender (ARG), dan/atau Tenaga ahli yang memahami analisis anggaran yang responsive gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 15

Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat :

a.PUG .....

- a. PUG dalam Peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam Siklus pembangunan di daerah;
- c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi tingkat pelaksanaan PUG dilakukan oleh Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran;
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 18

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. Penguatan kapasitas SKPD melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
- d. Pemberian penghargaan bagi SKPD yang melaksanakan PUG;
- e. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- f. Strategi pencapaian kinerja.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 19

Pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG dimasing-masing SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 15 Juli 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**

  
**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 15 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR : (17.6/2015)